



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| <i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> Katubi | 1-16 |
| ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH Ahrie Sonta | 17-35 |
| WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA Abd. Rahman | 36-47 |
| SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri | 48-59 |
| LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani | 60-75 |
| BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO Nabilla Nailur Rohmah | 76-87 |
| RITUAL <i>BEDEKEH</i> SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL Suroyo | 88-97 |
| TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Puji Hastuti | 98-102 |
| TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> Muhammad Luthf | 103-118 |



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| <i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> Katubi | 1-16 |
| ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH Ahrie Sonta | 17-35 |
| WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA Abd. Rahman | 36-47 |
| SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri | 48-59 |
| LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani | 60-75 |
| BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO Nabilla Nailur Rohmah | 76-87 |
| RITUAL BEDEKEH SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL Suroyo | 88-97 |
| TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Puji Hastuti | 98-102 |
| TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> Muhammad Luthfi | 103-118 |



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:**Katubi****TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRAK

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah serius dalam konstruksi kehidupan multikultur. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap berhasil dalam menjaga toleransi, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Alor-Pantar. Bahkan, ketika konflik dahsyat dengan isu agama melanda sebagian wilayah Indonesia bagian timur pasca-runtuhnya Orde Baru, solidaritas komunitas lokal orang Alor-Pantar mampu membuat mereka terhindar dari konflik dahsyat tersebut. Hal itu karena sejak dulu orang-orang di tiap kampung di Pulau Alor-Pantar mengembangkan cara untuk menghindari konflik, termasuk konflik yang bernuansa agama, berbasis tradisi. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Berbeda dengan berbagai tulisan para akademisi sebelumnya, tulisan ini membahas tradisi komunitas Muslim dan Kristiani di Alor dalam menata kehidupan mereka melalui nilai kebudayaan dengan memberikan penghormatan khusus pada tradisi lokal, yakni semboyan *Tara miti Tomi nuku*, yang artinya 'berbeda-beda tetapi satu bersaudara.' Untuk membahas persoalan itu, tradisi lisan *lego-lego* menjadi titik tekan pembahasan. Tulisan ini berdasar penelitian lapangan dengan metode etnografi. Berdasar analisis pelaksanaan tradisi lisan *lego-lego* dan lirik *lego-lego*, tulisan ini memaparkan dua hal, yaitu 1) praktik sosial-budaya yang telah dilakukan antarkelompok beragama yang berbeda dalam menjaga toleransi, 2) cara berbagai kelompok etnis di Alor mengajarkan pentingnya saling menghargai antarumat beragama melalui tradisi lisan *lego-lego*, terutama melalui lirik lagunya.

Kata kunci: *toleransi beragama, tara miti tomi nuku, lego-lego, tradisi lisan, Alor, multikulturalisme***DDC:****Ahrie Sonta****ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police habitus at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police doxa as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In

the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: *Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent*

DDC:

Abd. Rahman

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRAK

Paper ini bertujuan membahas secara singkat mengenai situasi keterpinggiran Loloda di Pesisir Pantai Barat Halmahera dalam segala sektor pembangunan dibandingkan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara. Berbicara mengenai Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, sebagai bagian integral dari dunia Maluku. Informasi sezaman menyatakan bahwa Loloda merupakan bekas kerajaan tertua Maluku (Moloku Loloda) di pesisir pantai barat laut Halmahera, Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” sejak berdirinya pada abad ke-13 Masehi. Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi Kerajaan Loloda terus berlagsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950-1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapuskan. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kekuatan hegemonik Ternate sebagai Warisan Kolonial Hindia Belanda atas Loloda, sehingga daerah bekas kerajaan Maluku tertua ini masih terpinggirkan dari pembangunan daerah dan nasional? Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah, melalui studi-studi kepustakaan, kearsipan, dan pengamatan di lapangan, serta wawancara lisan dengan informan-informan terpilih.

Kata Kunci: *Loloda, Halmahera, Warisan, Kolonial, Marginalisasi.*

DDC:

Ganesh Cintika Putri

SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRAK

Pembunuhan massal dan penghilangan paksa yang terjadi pasca tragedi 1965 menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.

Kata kunci: *seni, teater, rekonsiliasi, narasi alternatif*

DDC:

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM
MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRAK

Studi marginal mendekati fokus kajian sering pada identitas suatu komunitas tempatan, tanpa di sadari, pandangan tersebut mengkonstruksi dimensi marginal yang anakronistik. Studi tersebut menjerumuskan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina, dan memunculkan romantisme. Studi yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, berdasar pada fakta-fakta etnografis dan historis, serta observasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2018. Kami menggunkan hubungan relasional untuk menangkap plot transformasi pada catatan Eropa serta kajian historis yang sudah diterbitkan. Hubungan tersebut pada dasarnya mendeskripsikan kelompok pejuang yaitu buruh paksa yang dijadikan budak. Transformasi tidak meninggalkan dimensi tradisional, khususnya adalah bagaimana penguasaan selama ini dilakukan oleh sistem ekonomi Feodalisme hingga Kapitalisme. Di wilayah perbatasan, Orang Sangir yang tinggal dekat dengan laut melakukan mobilisasi sebelum orang-orang Eropa datang, dan dimensi tradisional tersebut masih dilakukan, tetapi dibawah kuasa baru, yaitu negara modern. Mendasarkan diri pada isu transnasionalisme dan sekuritas, Indonesia dan Filipina membuat regulasi yang mengatur mobilitas migran. Pada akhirnya, Orang Sangir tersebut merasa selalu menjadi kriminal, disematkan stigma ilegal, tereksklusi dari kepulauannya sendiri di mana masyarakat yang tidak tinggal di Sangihe Besar mengklaim dirinya sebagai *Orang Pulo*. Kami melihat bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sebagai wilayah abu-abu, cair, dan laboratorium kreatif.

Keywords: Marginal, Hubungan Relasional, Legal-Ilegal, Orang Sangir

DDC:

Nabilla Nailur Rohmah
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS,
LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji signifikansi historis ajaran leluhur dan lanskap Puncak Songolukur bagi masyarakat Tengger di Senduro dan bagaimana historisitas tersebut dimaknai, direpresentasikan, dan direkonstruksi dalam konteks sejarah masa kini. Dalam tulisan ini, cerita rakyat Tengger tentang “Joko Seger dan Roro Anteng” tidak dikaji sebagai legenda ataupun mitos, melainkan sebagai sejarah publik yang memiliki relevansi dengan realita sosial masa kini. Bagi orang Tengger, cerita mengenai asal-usul leluhurnya menyangkut keseluruhan kerangka teologis yang mendasari tatanan sosial dan praktik kultural dalam kehidupan kesehariaanya. Kebijakan Lima Agama Mayoritas rezim Orde Baru telah menyebabkan Hinduisasi dan Islamisasi besar-besaran, yang juga berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kultural masyarakat Tengger. Terlebih lagi, penerapan kebijakan Taman Nasional dan Pariwisata di ruang hidup mereka telah melahirkan tantangan yang lebih besar, yang memanifestasikan tatanan kehidupan yang semakin kapitalistik dan profan. Dalam kondisi ini, Puncak Songolukur menghadirkan dan merawat narasi historis mengenai leluhur masyarakat Tengger di Senduro, sebagaimana pula merawat nilai-nilai spiritual, tatanan sosial, praktik budaya, dan keseluruhan cara hidup yang menyertainya. Namun, pengembangan destinasi wisata “Puncak B29” di lanskap Puncak Songolukur sejak 2013 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi narasi sejarah masyarakat Tengger Senduro. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bagaimana pengembangan pariwisata dapat berpeluang menjaga sekaligus mengkontestasikan historisitas Puncak Songolukur. Pembahasan tersebut menyangkut bagaimana masyarakat Tengger di Senduro menegaskan, menegosiasikan, dan mengartikulasikan kembali identitasnya dalam konteks sejarah hari ini.

Kata kunci: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolukur, Historisitas, Artikulasi

DDC:
Suroyo

RINGKASAN DISERTASI:
RITUAL *BEDEKEH* SUKU AKIT DI PULAU RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRAK

Ritual *bedekeh* sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit. Suku Akit menggunakan sistem pengetahuan, kepercayaan persepsi sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi mereka terhadap konsep sehat dan sakit serta penyebab sakit tersebut. Suku Akit dan masyarakat pendukungnya telah memiliki pengetahuan lokal (*local knowlegde*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi masalah kesehatan dan cara mengobatinya apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Penelitian ini membahas tradisi ritual *bedekeh* suku Akit di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tradisi ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat suku Akit, tetapi keberadaan sekarang semakin terpinggirkan oleh faktor intern dan ekstern. Pelaksanaan ritual *bedikie* banyak mengandung kearifan lokal, simbol, nilai, dan dampak bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penelitian ritual *bedekeh* oleh *bomoh* pada suku Akit di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dirancang sesuai dengan paradigma keilmuan kajian budaya (*cultural studies*). Sebagai landasan analisis, digunakan teori hegemoni, teori praktik, dan teori wacana relasi kuasa dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan telaah dan metode analisis pelaksanaan upacara ritual mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perlengkapan upacara ritual dipimpin oleh *Batin* dan *Bomoh* menentukan waktu untuk mengadakan ritual. Kedua, penyerahan, yaitu *Bomoh* menyerahkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam upacara pelaksanaan ritual, Ketiga, *tegak bomoh*, yaitu berlangsungnya upacara ritual pengobatan oleh *bomoh*. Faktor yang memengaruhi semakin terpinggirnya ritual *bedekeh* suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah relasi kuasa dalam konversi agama, stigma negatif bahwa orang Akit terkenal dengan ilmu sihir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengobatan modern dan pengaruh pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang dan cara berpikir manusia. Implikasi dari keterpinggiran ritual *bedekeh* adalah sikap terbuka suku Akit melalui kontak budaya (akulturasi) dengan kebudayaan lain, penyederhanaan praktik ritual oleh *bomoh* dalam dimensi waktu, dan semakin menguatnya identitas suku Akit. Upaya yang dilakukan sebagai langkah strategis pewarisan ritual *bedekeh* secara intern dan ekstern. Profesi *bomoh* dianggap sangat membantu dan masih dibutuhkan untuk pengobatan, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada profesi *bomoh* dari segi pendanaan (tunjangan) agar lebih fokus terhadap profesi sebagai pengobat tradisional.

Kata kunci: bedikie, bomoh, suku Akit, keterpinggiran, pewarisan

DDC:
Puji Hastuti
TINJAUAN BUKU:
EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU:

MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA,

REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA:*

QUO VADIS?

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:**Katubi****TARA MITI TOMI NUKU: NURTURING TOLERANCE OF TRADITION IN ALOR, EAST NUSA TENGGARA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRACT

The increase of religious intolerance in Indonesia has recently become a serious problem in the construction of multicultural life. However, some areas in Indonesia are considered successful in maintaining tolerance, for instance, in the Province of East Nusa Tenggara, particularly in Alor-Pantar Island. When a great conflict in the context of religious issues occurred in parts of Eastern Indonesia after the collapse of the New Order, the Alor-Pantar local community could avoid this terrible conflict due to their solidarity. It is because people from each village in Alor-Pantar Island have developed means to avoid conflicts based on tradition, including conflicts in religious terms. Therefore, academics are encouraged to discuss about the religious life of the people in the Alor-Pantar Island and its relationship with customs. Different from prior writings, this article discusses the traditions of the Muslim and Christian communities in Alor in undergoing their lives through cultural values by giving special respect to a local tradition, *Tara miti Tomi nuku*, which means 'brotherhood in diversity'. To disclose this issue, the oral tradition of *lego-lego* will be the center of discussion. This paper is based on field research using ethnographic methods. Based on the analysis of the implementation of the *lego-lego's* oral tradition and the *lego-lego's* lyrics, this paper describes two things, which are 1) socio-cultural practices that have been carried out by different religious groups in maintaining tolerance; 2) means that various ethnic groups in Alor have been undertaken to teach the importance of interfaith mutual respect through the oral tradition of *lego-lego*, especially through the lyrics of the song.

Keywords: *religious tolerance, tara miti tomi nuku, lego-lego, oral tradition, Alor, multiculturalism***DDC:****Ahrie Sonta****ETHICAL CULTURE'S STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police *habitus* at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police *doxa* as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence

of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent

DDC:

Abd. Rahman

COLONIAL HERITAGE AND MARGINALIZATION OF THE LOLODA PEOPLE ON THE WEST COAST OF HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRACT

This paper aims to briefly discuss the marginalized situation of the Loloda people on the west coast of Halmahera in all development sectors compared to other regions in North Maluku. Discussing North Maluku, it is not complete without talking about Loloda as an integral part of the Moluccas' world. Contemporary information states that Loloda is the oldest kingdom of Moluccas (Moloku Loloda) on the northwest coast of Halmahera, the Molucca Sea Region and Islands. Loloda is the main part of the history and culture of the "Moluccan world" since its foundation in the 13th Century. Attempts to maintain and preserve customs and traditions of the Kingdom of Loloda are still ongoing until today, although since the Old Order period (1950-1969), all regions in Indonesia dominated by the Kingdom and Sultanate systems were abolished. Those regions are integrated into the nomenclature of the regional administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This integration is the realization of restructuring the Republic of Indonesia to the new and official form for more than two decades of independence. The question is whether or not the hegemonic power of Ternate as the Dutch East Indies' colonial heritage of Loloda remains in existence, so the former area of the oldest kingdom of Moluccas is still marginalized from regional and national development. This article utilizes historical methods and methodologies throughout a study of literature, archives, and field observations, as well as interviews with selected resource persons.

Keywords: Loloda, Halmahera, Heritage, Colonial, Marginalization

DDC:

Ganesh Cintika Putri

ART FOR PEACE: GRASSROOTS' RECONCILIATION EFFORTS AFTER THE 1965 TRAGEDY

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRACT

Mass killings and enforced disappearances which occurred after the 1965 tragedy have been becoming a prolonged conflict until today. The historical narrative shaped by the government puts a group of people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) experiencing stigmatization and injustice for up to 40 years. This paper intends to analyze the strategies undertaken by grassroots communities to create alternative narratives as a part of the reconciliation efforts. Particularly, this paper will examine the alternative historical narratives presented in the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance on July 13, 2017, in Yogyakarta. This performance was chosen due to the arts of scripts making, practices, choices of speaking methods, and the involvement of audiences which were able to narrate alternative history amidst the dominance of narratives that hindered the reconciliation attempts. This paper would like to say that the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance has contributed a space to historical narratives as a part of grassroots reconciliation efforts. There are, at least, three strategies implemented to achieve those objectives, which are: the packaging of alternative narratives in an art object which is safer than persecution; the participation of survivors as the subject of the narrative, and; the involvement of audiences in the process of presenting the narration.

Keywords: art, theater, reconciliation, alternative narratives

DDC:

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani

MARGINALIZATION LEVELS AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN BORDER COMMUNITIES ON THE INDONESIA-THE PHILIPPINES BORDER

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRACT

Marginal studies often focus on the identity of a local community which unconsciously construct an anachronistic marginal dimension. That study also plunged the people of the Indonesia-the Philippines border and showed up romanticism. The research was conducted on Sangihe Islands, based on ethnographic and historical facts and observations undertaken in July-August, 2018. We use relational relations to capture the plot of transformation in European records and historical studies that have been published. The relationship describes a group of fighters which consisted of forced laborers who became slaves. Transformation cannot be disengaged from the traditional dimension, particularly on how control has been ruled out by the dominance of the economic system of Feudalism to Capitalism. In the border area, the Sangir people, who resided nearby the sea, mobilized before the Europeans arrived. The traditional dimension was still carried out, but under the new authority, which is the modern state. Based on the issues of transnationalism and security, Indonesia and the Philippines made a regulation that regulated the mobility of migrants. The Sangir people, eventually, found themselves as criminals, which were identic with illegal stigma, and were excluded from their own islands where people who did not live in Sangihe Besar claimed themselves as *Orang Pulo*. We perceive the Indonesia-the Philippines border as a gray, liquid, and creative laboratory area.

Keywords: Marginal, Relational Relations, Legal-Illegal, Sangir People

DDC:

Nabilla Nailur Rohmah

SIDE BY SIDE WITH ANCESTORS IN THE FUTURE: HISTORICAL, LANDSCAPE, AND ARTICULATION OF THE IDENTITY OF THE TENGGER SENDURO PEOPLE

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRACT

This article studies the historical significance of the ancestral tenet and the landscape of Puncak Songolikur for Tengger people in Senduro and how they are being performed, represented, and reconstructed in the present historical context. In this paper, the Folklore of Tengger about “Joko Seger and Roro Anteng” is studied neither as legend nor myth, but as public history which has relevance to the present social realities. For them, the story of the origin of their ancestor encompasses the overall theological framework that underlies the social order and cultural practices in their everyday life. The five religions policy during the authoritarian New Order regime has led to a massive Hinduization and Islamization which has a great influence on the social and cultural order of Tengger people. Moreover, the enforcement of national park and tourism policy in their living space has raised greater challenge which manifests an increasingly capitalistic and profane life order. Under this condition, Puncak Songolikur presents and preserves the historical narrative about their ancestors as well as spiritual values, social order, cultural practice, and life. However, the development of tourist destination “Puncak B29” in the landscape of Puncak Songolikur since 2013 has become both a challenge and opportunity for their historical narratives. This paper explores how tourism development maintains and simultaneously contests the historicity of Puncak Songolikur. It includes how people assert, negotiate, and rearticulate their identity in current cosmopolite historical horizon.

Keywords: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur, Historicity, Articulation

DDC:

Suroyo

DISSERTATION SUMMARY: THE *BEDEKEH* RITUAL OF THE AKIT PEOPLE IN RUPAT ISLAND, BENGKALIS REGENCY, RIAU PROVINCE, IN THE GLOBAL ERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRACT

The *bedekéh* ritual is closely linked to the customs and traditions of the Akit people. The Akit people use the system of knowledge in which the belief in perception as a part of their culture and tradition towards health and sick concepts as well as the causes of diseases. The Akit people and their relatives utilize local knowledge and local wisdom in overcoming health problems as well as a means to cure the diseases. This research discusses the ritual tradition of *bedekéh* traditionally held by the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province. The Akit people remain practicing this tradition, but its existence is now slowly marginalized by internal and external factors. *Bedekéh rituals* encompass a lot of local wisdom, symbols, values, and impacts for the lives of the Akit People. Research on *bedekéh rituals* by the *bomoh* of the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province was designed based on the scientific paradigm of cultural studies. As an analysis framework, hegemony, practical, and power and knowledge relations theories are used to sharpen the research result. The data collection was undertaken through observations, in-depth interviews, a study of literature, and documentation.

Based on research and analysis methods, the implementation of rituals has several steps to be done. First, an investigation in which the inspection of ritual equipment is done and led by *Batin*, and *Bomoh* determines the time to hold the rituals. Secondly, a handover in which *Bomoh* gives the necessary equipment and materials for the implementation of rituals. Thirdly, *tegak bomoh* in which *bomoh* conducts the rituals for treating sick people. Some factors affecting the marginalized condition of *bedekéh* rituals of the Akit people in Hutan Panjang Village, Rupert District, Bengkalis Regency, Riau Province are power relations in religious conversion. It is seen that there is a negative perspective towards the Akit People who are famous for witchcraft, the development of science and technology in the modern medical system, and the influence of formal and non-formal education on various levels and the changing of ways of thinking in human beings. The impacts of the marginalized condition of *bedekéh* ritual are: the Akit people are more open in which cultural contacts (acculturation) occurred with other cultures, the ritual practices are simplified by *bomoh*, and the identity of the Akit people is getting stronger. These attempts are done as strategic steps to inherit *bedekéh* rituals internally and externally. *Bomoh* is considered very helpful and is still necessary for medication. The government is expected to provide assistance to *bomoh* in the context of funding (allowances) in order to be more focus on their job as a traditional healer.

Keywords: bedekéh, bomoh, Akit, marginalization, inheritance

DDC:

Puji Hastuti

TINJAUAN BUKU: EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU: MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?*

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA

Abd. Rahman

*Mahasiswa Doktoral Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia, Depok & Dosen Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Khairun, Ternate.
Email: randy5eman@ymail.com*

ABSTRAK

Paper ini bertujuan membahas secara singkat mengenai situasi keterpinggiran Loloda di Pesisir Pantai Barat Halmahera dalam segala sektor pembangunan dibandingkan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara. Berbicara mengenai Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, sebagai bagian integral dari dunia Maluku. Informasi sezaman menyatakan bahwa Loloda merupakan bekas kerajaan tertua Maluku (Moloku Loloda) di pesisir pantai barat laut Halmahera, Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” sejak berdirinya pada abad ke-13 Masehi. Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi Kerajaan Loloda terus berlangsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950-1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapuskan. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kekuatan hegemonik Ternate sebagai Warisan Kolonial Hindia Belanda atas Loloda, sehingga daerah bekas kerajaan Maluku tertua ini masih terpinggirkan dari pembangunan daerah dan nasional? Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah, melalui studi-studi kepustakaan, kearsipan, dan pengamatan di lapangan, serta wawancara lisan dengan informan-informan terpilih.

Kata Kunci: *Loloda, Halmahera, Warisan, Kolonial, Marginalisasi.*

ABSTRACT

This paper aims to briefly discuss the marginalized situation of the Loloda people on the west coast of Halmahera in all development sectors compared to other regions in North Maluku. Discussing North Maluku, it is not complete without talking about Loloda as an integral part of the Moluccas' world. Contemporary information states that Loloda is the oldest kingdom of Moluccas (Moloku Loloda) on the northwest coast of Halmahera, the Molucca Sea Region and Islands. Loloda is the main part of the history and culture of the “Moluccan world” since its foundation in the 13th Century. Attempts to maintain and preserve customs and traditions of the Kingdom of Loloda are still ongoing until today, although since the Old Order period (1950-1969), all regions in Indonesia dominated by the Kingdom and Sultanate systems were abolished. Those regions are integrated into the nomenclature of the regional administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This integration is the realization of restructuring the Republic of Indonesia to the new and official form for more than two decades of independence. The question is whether or not the hegemonic power of Ternate as the Dutch East Indies' colonial heritage of Loloda remains in existence, so the former area of the oldest kingdom of Moluccas is still marginalized from regional and national development. This article utilizes historical methods and methodologies throughout a study of literature, archives, and field observations, as well as interviews with selected resource persons.

Keywords: *Loloda, Halmahera, Heritage, Colonial, Marginalization*

PENDAHULUAN

Keterpinggiran sebuah komunitas suku bangsa dalam ruang-ruang kehidupannya pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menandakan bahwa komunitas suku bangsa atau masyarakat tersebut juga sudah terlupakan,

terabaikan, terpinggirkan, atau tersingkirkan dalam sejarah nasionalnya. Oleh karena itu sejarah suku bangsa dan daerahnya itu harus kembali dicoba untuk diingat, ditemukan kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Bernard Lewis (2009).

Maluku Utara, di mana Loloda berada adalah sebuah propinsi di Indonesia yang terkenal sebagai daerah seribu pulau dan daerah kepulauan rempah-rempah (*the spices islands*) dengan berbagai suku bangsa yang ada di sana. Baik suku bangsa asli, suku bangsa migran lokal, suku bangsa migran nasional, maupun suku bangsa keturunan asing (terutama Arab dan Cina). Maluku Utara kini terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Empat di antaranya yang sudah sangat terkenal sejak jaman Portugis hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Selain sebagai suku bangsa dan bahasa, keempatnya adalah bekas kerajaan Islam kuno utama yang pernah ada dalam sejarah dunia Maluku. Keempatnya dikenal sebagai penghasil rempah pala dan cengkih utama di Kawasan laut dan kepulauan Maluku. Namun siapa mengira bahwa Loloda juga termasuk salah satu dari lima kerajaan utama di Kawasan rempah itu bahkan jauh lebih tua dibandingkan empat kerajaan yang disebutkan sebelumnya.

Dari kelima kerajaan itu, keempatnya sudah berotonomi sendiri sebagai daerah kabupaten dan kota sebagaimana yang terlihat sekarang ini. Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia Ternate adalah ibukota administratif bekas kerajaan/kesultanan Ternate, Tidore adalah ibukota bekas kerajaan Tidore, Bacan adalah bekas kerajaan Makian yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan yang beribukota di Labuha, dan Jailolo adalah bekas kerajaan Moti, yang kemudian berpindah ke daratan Halmahera bagian utara yang bernama Jailolo kini menjadi ibukota Kabupaten Halmahera Barat. Tetapi berbeda dengan Loloda yang merupakan bekas kerajaan tertua di Maluku Utara yang dalam banyak sumber tertulis Belanda seperti Valentijn (1742), de Clercq (1890), van Fraassen 1985 & 1987) justru sampai sekarang tetap menjadi daerah setingkat kecamatan yang di masa lampau adalah kerajaan setingkat distrik (kabupaten).

Sampai pada pada 1908, Loloda tetap eksis sebagai salah satu daerah yang berbasis sebagai kerajaan di Maluku walaupun berada di bawah hegemoni Kesultanan Ternate sebagai kerajaan vazal. Situasi yang unik dan menarik ialah sampai hari ini Loloda tetap sebagai kecamatan dalam

nomenklatur birokrasi dan administrasi penataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca runtuhnya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia.

Persoalan lain yang yang dialami oleh penduduk Loloda selain status wilayah yang tidak kunjung berubah karena berada di luar pertimbangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ialah bahwa meskipun Loloda selalu mencoba untuk berkontestasi dalam merubah status wilayahnya dari kecamatan kepada kabupaten, dalam rangka Undang-Undang Otonomi Daerah yang bergulir sejak UU Otda No 22 Tahun 1999 pasca runtuhnya Orde Baru hingga UU Otda terakhir No. 34 Tahun 2004, Loloda tetap sebagai kecamatan. Ironisnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003, Seluruh wilayah milik Loloda yang membentang dari pesisir pantai barat laut hingga pantai barat daya Halmahera justru dibagi menjadi dua bagian, yaitu Loloda Utara masuk ke wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang beribukota di Tobelo dan Loloda Selatan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang beribukota di Jailolo. Loloda terdiri dari dua buah gugusan pulau utama yaitu Loloda Utara Kepulauan masuk ke dalam wilayah administrative Kabupaten Halmahera Utara dan Loloda Selatan Kepulauan dan Loloda Selatan Kepulauan masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Halmahera Barat.

Pertanyaan penelitian yang muncul sampai hari ini terkait status wilayah Loloda yang dalam konstestasinya memperjuangan perubahan status wilayahnya menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai Kabupaten tidak pernah berhasil. Mengapa Loloda hanya tetap sebagai kecamatan dan tidak pernah berubah menjadi kabupaten? Seberapa jauh pengaruh sejarah kebesaran Loloda di dunia Maluku di masa lalu membagikan kesadaran sejarah rakyat Loloda untuk perubahan status wilayahnya yang telah terbagi dua itu? Apa bedanya Loloda dengan daerah-daerah lain yang baru saja berotonomi sebagai Kabupaten Baru di Maluku Utara yang tidak memiliki kelebihan sejarah dan budaya masa lalu sebagaimana yang dimiliki Loloda? Ambil contoh misalnya Morotai dan Taliabu di wilayah Kepulauan Sula.

PEMBAHASAN

Loloda Tanpa Perhatian

Wilayah Loloda secara geografis membentang pada sepanjang pesisir pantai barat Halmahera bagian utara, berada dalam satu pulau dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Halmahera di mana terdapat pusat pemerintahan Propinsi Maluku Utara. Ibukota propinsi ini berada di Sofifi Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah. Meskipun Loloda berada pada jalur transportasi darat Halmahera khususnya Halmahera Utara dan Barat justru tidak tersentuh oleh program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah baik sebelum orde baru (1967-1998) maupun sesudah orde reformasi.(1999—sekarang). Sebagian besar masyarakat Loloda masih merasakan sulitnya menemukan jalan darat walau hanya semeter saja di kampung mereka. Fasilitas transportasi darat dan laut antarpulau masih sangat terbatas sehingga daerah ini cenderung terisolasi dari dunia luar. Fasilitas publik seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara, listrik untuk penerangan), Telkom (sarana telekomunikasi), dan PAM (Perusahaan Air Minum, untuk pemenuhan air bersih dan minum) penduduk belum ada belum lagi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang masih sangat memprihatinkan. Masyarakat Loloda sudah selama 73 tahun lamanya belum juga tersentuh pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan fasilitas-fasilitas daerah lainnya, padahal salah satu tujuan otonomi dan pemekarannya daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperpendek rentang kendali birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Aspirasi Pembentukan Loloda Pasifik

Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 sudah sangat terasa dampaknya dengan munculnya puluhan bahkan ratusan DOB kabupaten baru di Indonesia termasuk daerah-daerah lain di Kawasan Timur Indonesia seperti Maluku Utara yang saat ini sudah memiliki dua belas kabupaten/kota kecuali Loloda. Sementara itu ada pula beberapa lagi yang sedang diusulkan untuk dimekarkan seperti kota Tobelo, Galela, Kao

Raya, Kota Sofifi, Obi, Taliabu, Wasilei, Gane, dan Loloda. Semuanya ingin berotonomi, tetapi semangat pemekaran daerah tidak selamanya bisa terpenuhi sekaligus, karena pemerintah pusat telah mengeluarkan *moratorium* (penundaan) pada pemekaran dan bukan penggabungan daerah.

Ketika Loloda dilihat dari perspektif masa depan maka asumsi kuat yang muncul adalah bahwa Loloda dapat dengan cepat menjadi daerah otonom sebagai Kabupaten. Sebagian besar masyarakat Loloda menyebut-nyebut Loloda Pasifik sebagai nama kabupatennya nanti. Mereka mengusulkan Loloda untuk menjadi daerah penggabungan sesuai dengan amanat undang-undang yang tidak dikenai moratorium. Caranya adalah dengan statusnya menjadi daerah otonom baru dengan tiga wilayah.

Kabupaten Loloda Pasifik yang diperjuangkan pembentukannya telah memiliki tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (Baja, Laba, dan Kedi), dan dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yakni Dama dan Durume), serta satu kecamatan di Kota Ternate (Mayau Batang Dua). Dengan demikian maka secara total nantinya Kabupaten Loloda Pasifik akan memiliki enam wilayah kecamatan yang berasal dari tiga wilayah Kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu peluang pembentukan Kabupaten Loloda Pasifik benar-benar dapat dimanfaatkan dan diayakini berhasil 100%.

Lima kecamatan yang rencananya akan tergabung ke dalam Kabupaten Loloda Pasifik telah berumur lima tahun ke atas. Termasuk yang umurnya sudah 73 tahun terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Kecamatan-kecamatan itu adalah Darume dan Kedi sedangkan Dama dan Mayau sudah berusia delapan tahun, sementara Baja dan Laba usianya belum cukup lima tahun, jadi ada empat kecamatan yang sudah berumur di atas lima tahun, dan hal ini sangat mendukung terbentuknya otonomi baru (Mapanawang, 2012).

Jika dilihat dari ukuran luas wilayahnya, maka Loloda adalah daerah yang terpanjang dan terluas di Maluku Utara, panjangnya ± 350 km, atau seperempat panjang Halmahera yang terbentang dari Linggua hingga Jere (dari Selatan ke Utara). Penduduk Loloda berjumlah ± 55000

jiwa; jumlah sumber daya manusianya terdiri dari sembilan orang doktor, ratusan magister dan sarjana dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun sumber daya alam yang dimiliki Loloda adalah: 1. Area minyak bumi di wilayah Kahatola Loloda Selatan; 2. Tambang mangan dieksploitasi sejak tahun 1957-sekarang, yang terdapat di Loloda Kepulauan; 3. Tambang emas (dari Doitia hingga Aruku) di Loloda Daratan; 4. Tambang Nikel (di Gisi Kapa-kapa) di Loloda Utara; 5. Pasir besi (dari Baja hingga Tate) 500 juta ton, di Loloda Daratan; 6. Kayu damar dan lain-lain dari Supu hingga Tomdere (sejak tahun 1977-sekarang), di Loloda daratan; 7. Sarang burung walet (di Kahatola) Loloda Selatan; 8. Wisata bahari (hamparan koral terpanjang di dunia, di Kahatola hingga Tobo-tobo); 9. Wisata pantai di Posi-Posi, Darume, Turamo Asimiro, Loloda Selatan; 10. Pulau Diti Penangkaran terdapat banyak habitat ketan kenari, di Loloda Daratan; 11. Perikanan yang memiliki prospek menjanjikan; 12. Prospek pertanian, kopra, pala, cengkih, dan coklat; 13. Potensi bio-etanol dari pohon aren pengganti bahan bakar minyak (BBM) konvensional dari fosil; 14. Dan lain-lain.

Selain itu, Loloda memiliki akses ekonomi dan transportasi laut: 1. Loloda-Tobelo 7 jam; 2. Loloda-Ternate 9 jam; 3. Loloda-Bitung-Manado 16-18 jam. Masyarakat Loloda yakin bahwa potensi SDA dan SDM yang dimiliki Loloda akan mampu mensejahterahkan penduduk Loloda dari awal hingga akhir perjalanan sejarah Kabupaten Loloda Pasifik jika sudah terbentuk. Tujuan pemekaran dan penggabungan ini akan menciptakan roda ekonomi baru bagi Loloda dan mampu memperpendek rentang kendali administrasi pemerintahan di daerah (Mapanawang, 2012).

Awal Mula *Moloku Kie Raha* dan *Loloda*

Perkembangan sejarah Maluku Utara telah memperlihatkan bahwa Loloda merupakan sebuah wilayah dengan komunitas masyarakat yang pada awalnya terbentuk melalui jaringan kekuasaan tradisional. Kondisi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena wilayah ini pernah dilegitimasi melalui organisasi politik yang berbentuk kerajaan. Dalam catatan sejarah politik

di Maluku Utara, dijelaskan bahwa Kerajaan Loloda merupakan salah satu Kerajaan Maluku yang tidak terkonfigurasi kedalam kesatuan *Moloku Kie Raha* yang terdiri dari Ternate, Tidore, Makian (Bacan), dan Moti (Jailolo). Kenyataan ini disebabkan karena Kerajaan Loloda tidak sempat menghadiri pertemuan raja-raja Maluku di Pulau Moti, *Motir Verbond* (*Motir Staten Verbond*) atau Persekutuan Moti (konfederasi Moti) pada tahun 1322 M yang diprakarsai oleh Raja (*Kolano*) Ternate ke-7, Sida Arief Malamo.

Belum ada sumber tertulis yang menyebutkan secara jelas tentang kapan dan bagaimana Kerajaan Loloda ini terbentuk. Kitab *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca dari Kerajaan Majapahit pada 1365 menyebutkan bahwa di Loloda Halmahera pada masa paling awal telah berkuasa seorang *Kolano* (raja). Hasan (2001:179-182) mengungkapkan bahwa secara umum Kerajaan-kerajaan Maluku termasuk Kerajaan Loloda dan Kerajaan Moro berdiri pada abad ke-13. Bahkan disebutkan juga bahwa Loloda adalah kerajaan tertua di Halmahera (Abdurrahman, Leirissa, & Luhulima, 1973:163)

Dalam *Kroniek Van Het Rijk Batjan* (Kronik Kerajaan Bacan) sebagaimana ditulis oleh Coolhaas (1923) dikisahkan bahwa Kerajaan Loloda didirikan oleh Kaicil Komalo Besi, putera Sultan Bacan yang pertama, Said Muhammad Baqir Bin Jafar Shadik yang bergelar “Sri Maharaja yang bertahta di bukit Sigara” yang kawin dengan Boki Topowo dari Galela.

Di kalangan masyarakat Loloda terdapat cerita rakyat yang mengungkapkan bahwa Kerajaan Loloda didirikan oleh seorang tokoh legendaris yang datang dari Ternate melalui Galela. Tokoh ini bernama Kolano Tolo alias Kolano Usman Malamo (Mansur, 2007). Peristiwa kedatangan Raja Loloda ini berkaitan dengan meletusnya Gunung Tarakani (Mamuya) di Galela yang kemudian mendorong tokoh ini menyingkir ke Loloda. Peristiwa ini menjadi cikal-bakal nama Loloda yang dalam bahasa Galela disebut “Loda” yang berarti “pindah” atau “hijrah”.

Sebelumnya nama Loloda adalah “Jiko Mabirahi”. Dari beberapa versi di atas ditemukan petunjuk bahwa keberadaan Loloda dalam sejarah

politik pemerintahan di Maluku jelas merupakan suatu keniscayaan sejarah (Coolhaas, 1923). Dari sumber-sumber lokal lainnya, didapatkan cerita tentang keberadaan Loloda, di mana disebutkan bahwa asal mula Loloda itu berasal dari suatu kerajaan tua yang pernah berkuasa di Galela. Konon, kemudian di tahun 1322 M, setelah gunung berapi di Galela meletus dan mengancam kehidupan di sana, pusat kerajaan itu dipindahkan ke Loloda. Kepindahan ini terjadi pada masa Kolano Bakun Malamo, penguasa Galela terakhir.

Secara Linguistik, Loloda dalam bahasa Ternate itu berarti “tempat orang pindahan”. Bila kita meneliti lebih jauh dari kata ini, Loloda berasal dari kata *Lodaka* yang bermakna “orang pindahan”. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kata Loloda mengandung makna yang menggambarkan suatu peristiwa bencana alam yang dahsyat di masa lampau sehingga terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran (Valentijn, 1724; de Clercq, 1890; & van Baarda, 1904).

Loloda dan Pertemuan Moti

Loloda, seungguhnya juga adalah salah satu kerajaan peserta pada pertemuan raja-raja Maluku Utara di Pulau Moti (Pertemuan Moti) yang dikenal sebagai: konfederasi Moti, *Motir Staten Verbond*, Persekutuan Moti, atau “Traktat Moti”, yang berlangsung di tahun 1322 (Naidah dalam Crab, 1876), dan isi perjanjiannya berlaku hingga 1343 M (21 tahun) lamanya. Pertemuan ini diprakarsai oleh Raja Ternate ke-7, Sida Arif Malamo. Loloda gagal menghadiri pertemuan konfederasi raja-raja Maluku di Pulau Moti (*Motir Verbond*, 1322). Menurut versi tradisi lisan setempat di Ternate dan Tidore mengatakan bahwa kegagalan Loloda untuk hadir dalam Peretmuan Moti adalah karena perahu Raja Loloda dan rombongannya dilanda badai dalam perjalanan menuju Moti yang membuatnya terdampar di pantai Dufa-dufa Ternate. Karena terlambat, raja Loloda dan rombongannya ditolak keanggotaannya dalam Persekutuan Moti yang beranggotakan raja Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Yang menarik ialah bahwa ketika kondisi alam mulai membaik Raja Loloda bersama rombongannya tidak kembali lagi ke Loloda

Halmahera karena mengantisipasi timbulnya kembali cuaca buruk dan merasa bahwa kerajaannya bukan anggota Persekutuan Moti (Motir Verbond, 1322-1343). Raja Loloda dan rombongannya justru melanjutkan perjalanannya ke wilayah Sulawesi Utara. Di wilayah ini selama ratusan tahun lamanyamelakukan diaspora genealogis di Menado dan Bolaang Mongondow. Migrasi dan diaspora itu telah terjadi sejak sekitar akhir abad ke-14 (Supit, 1985). Secara genealogis, raja-raja Loloda awal sesungguhnya memiliki garis keturunan yang sama dengan raja-raja *Moloku Kie Raha* (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) yang tergabung dalam Persekutuan Moti (1322-1343) sebagaimana yang dicatat oleh Valentijn (1724), Stibbe dalam *ENI* (1918-1939), dan van Fraassen (1985 & 1987)..

Dalam rentang waktu proses berjalannya sejarah dunia Maluku, terutama sejak intervensi Kompeni Belanda di bawah kendali (Vereenigde Oost Indische CampagniePerhimpunan dagang Hindia Timur Belanda) atau VOC (1607-1799), Loloda sebagai sebuah entitas politik dan kekuasaan tertua di Maluku pada akhirnya mengalami degradasi kedaulatan melalui Ternate. Namun demikian Kerajaan Loloda tidak langsung menghilang begitu saja akibat konstelasi politik yang berlangsung selama kurang dari empat abad lamanya terhitung dari masa awal VOC hingga runtuhnya pembubaran Kerajaan Loloda pada 1909.

Apabila dianalisa lebih jauh lagi, maka dapat dikatakan bahwa Pertemuan Moti yang menghasilkan *Motir Staten Verbond* adalah awal dari retaknya “dunia Maluku”, di mana Loloda oleh empat kerajaan utama di sekitarnya tidak diakui sebagai kerajaan pewaris dunia Maluku. Meskipun kerajaan-kerajaan anggota Persekutuan Moti tidak bisa membantah bahwa Loloda adalah bagian integral Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku baik secara mitologis, genealogis, geografis, kultural, sosiologis, dan historis, setidaknya dalam pengertian politis. Loloda sebagai salah satu dari lima kerajaan utama Maluku yang berada di semenanjung utara Halmahera pada akhirnya menjadi ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan antara dua kerajaan hegemonik di Maluku Utara yaitu Ternate

dan Tidore. Akan tetapi Ternate berhasil sebagai pemenang dalam menanamkan kekuasaannya atas Loloda, walaupun tidak secara mutlak menjadi bawahan Ternate, karena Loloda tetap memiliki raja dan kerajaan sendiri walaupun vazal. Sejak saat itu Loloda hilang dalam sejarah tertulis dunia Maluku. Sejarah Loloda hanya terekam melalui tradisi lisan dan memori kolektif masyarakatnya yang sudah jarang diperoleh.

Posisi Loloda di antara Ternate dan kerajaan-kerajaan Maluku lainnya

Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge (1677-1682) dalam memori serah terima jabatan kepada penggantinya Jacob Lobs (1682-1686), mengingatkan sebutan yang terkenal bagi kerajaan-kerajaan di Maluku sebagai berikut: Loloda, *ngara ma-beno* (dinding pintu), Jailolo, *jiko ma-kolano* (penguasa teluk), Tidore, *kie ma-kolano* (penguasa pegunungan), Ternate, *kolano Maluku* (penguasa Maluku), dan Bacan, *dehe ma-kolano* (penguasa daerah ujung), dan hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Andaya (1993: 51, 93, & 232).

Makna sebutan di atas menunjukkan bahwa dalam deretan kerajaan-kerajaan Maluku, Loloda ada di dalamnya. Kerajaan Loloda adalah bagian tidak terpisahkan dari kerajaan-kerajaan besar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Secara genealogis, menurut sejarah Maluku versi Tidore, raja-raja Loloda berinduk pada puteri Jafar Sadek ketiga, Sagarnawi. Kerajaan-kerajaan Maluku, yakni Loloda, Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan, merupakan *panca tuggal* (van Fraassen, 1987: 462). Bila kerajaan-kerajaan tersebut diasosiasikan dengan *soa fala raha*, maka muncul skema berikut ini: Ternate→Marsaoli, Tidore→Limatahu, Jailolo→Tomagola, Bacan→Tomaito, Loloda→Tamadi.

Keberadaan Loloda dalam sejarah kekuasaan politik di Maluku jelas sudah merupakan suatu keniscayaan. Dari sejumlah sumber yang ada, di mana secara tersirat bahwa terdapat petunjuk mengenai kedudukan Loloda yang sangat penting dalam suatu periode sejarah masa lampau di Maluku. Dari kedua versi di atas, bila dibandingkan, maka akan dihasilkan beberapa kesimpulan yang menarik. Pertama, dari cerita

di atas, Ternate, Tidore, dan Jailolo belum disebut namanya. Kenyataan ini menyiratkan tentang kedudukan yang lebih utama dari Loloda, di kawasan lain di Halmahera Utara. Kedua, suatu penekanan pada aspek lain, yaitu tentang hubungan elemen-elemen Loloda yang non-Austronesian dengan Bacan yang Austronesian.

Loloda dalam Tarikan Dunia Celebes

Keterkaitan antara Loloda dengan kekuasaan lain di Celebes (Sulawesi), dapat dilacak dari sejarah raja-raja Bolaang Mongondow. Kajian sejarah yang ditulis oleh *W. Dunnebier*, menjelaskan bahwa asal-usul kerajaan Bolaang Mongondow berpangkal pada seorang tokoh legendaris yang hidup di abad ke XIV bernama *Loloda Mokoagow* – tokoh ini diduga merupakan anak raja Loloda yang melarikan diri ke *Sula Wessy* karena negerinya diserang oleh *Kumalo Poeloe*, penguasa Ternate pada 1380. Setibanya anak raja Loloda ini—di suatu tempat bernama *Maadon (Kema, Sulawesi Utara)*. Tokoh ini merupakan cikal-bakal raja-raja Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara. Secara Linguistik, Loloda dalam bahasa Ternate berarti: “*Tempat Orang Pindahan*”. Bila meneliti lebih jauh kata ini, Loloda berasal dari kata *Lodaka* yang bermakna: “*Orang Pindahan*”. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kata ‘Loloda’ mengandung suatu makna yang menggambarkan suatu peristiwa alam yakni bencana alam luar biasa di masa lampau sebagai penyebab terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran waktu itu.

Loloda di Luar Moloku Kie Raha dan Diaspora Sulawesi Utara

Moloku Kie Raha nampaknya mengambil keputusan sepihak untuk menghapus Loloda sebagai anggota persekutuan Moti sejak 1322, pasca pembentukan *Motir Verbond*, hingga NKRI terbentuk pada 1945, yang hingga hari ini mereka tidak mau mendukung pembangunan Loloda, sebagai salah satu aset sejarah Maluku Utara (Mapanawang, 2012:133). Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan di bawah ini antara lain adalah:

- 1) Pada abad ke-17, terjadi konflik di internal kerajaan Loloda, yang menyebabkan salah satu pangeran kerajaan ini keluar dan berangkat menuju *Celebes* (Sulawesi Utara) dan membentuk kerajaan *Maadono* di Lelang Kema Minahasa Utara (Menado Tua, hingga ke Pantai Rerer di Tondano) sebagaimana yang dicatat oleh Valentijn (1724).
- 2) Salah satu keturunan pangeran Loloda pelarian tersebut adalah Loloda Mokoagow hasil perkawinan antara pangeran Loloda dengan salah seorang bangsawan kerajaan Bolaang Mongondouw Raja ini memimpin perang melawan Minahasa (Perang Poigar) yang pada membuat Poigar terbagi menjadi dua yaitu Poigar Bolmong dan Poigar Minahasa.
- 3) Dalam sejarah Minahasa di masa lalu, nama *Airmadidi* muncul setelah seorang *kapita* (kapten) yang bernama Sibuh (kapitan Sibuh) melakukan tarian *cakalele* dan menancapkan keris ke tanah yang kemudian tanah mengeluarkan air panas mendidih (*airmandidi*). Sejak saat itu daerah tersebut dikenal dengan *airmadisi*.

Kerajaan *Maadono* yang akhirnya dianeksasi oleh Kerajaan Bolaang Mongondow menyebabkan rakyat kerajaan *Maadono* bercerai-berai dan sebahagiannya menghuni pulau Manado Tua yang saat itu belum punya nama. Penduduk pertama yang menghuni pulau itu adalah rakyat kerajaan *Maadono*. *Maadono* dalam bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Utara baik Minahasa, Sangir, Bolaang Mongondow, Gorontalo tidak ada kaitannya dengan kata *Maadono* itu sendiri. *Maadono* untuk kosa kata bahasa Loloda Halmahera berarti telah tiba (*torang so sampe*) di tempat terakhir. Jadi dari perkembangan yang terjadi seiring waktu yang berjalan maka *Maadono* dari pulau Manado Tua berpindah ke kota Manado sekarang, dan sejak saat itulah kata Manado dikenal, seperti halnya kata "Mollucas" oleh Portugis, "Mollukken" oleh Belanda, dan "Al-Muluk" oleh bangsa Arab dan akhirnya menjadi Maluku saat ini.

Pada tahun 1627 Kerajaan Loloda dianeksasi oleh Kerajaan Ternate sewaktu Sultan Hamzah memimpin Ternate. Dalam keadaan tertekan inilah terjadi konflik internal di kerajaan Loloda yang

akhirnya salah satu pangerannya meninggalkan Loloda tepatnya pergi ke desa Lilang Minahasa Utara saat ini (kerajaan *Maadono*). Berbagai sumber penyebab perginya pangeran dari Loloda Halmahera ini juga direkam oleh seorang pendeta terkenal yang pada waktu itu bertugas di Ambon dalam tahun 1600-an, yaitu Francois Valentijn, di mana pangeran Loloda membentuk kerajaan di Sulawesi Utara (Minahasa Utara) juga anak dari Pendeta Missionaris Ridel di Tondano, yang dalam catatannya mengatakan bahwa orang-orang Bacan di Halmahera telah menduduki Manado Tua dan Minahasa bagian Utara.

Dari rekaman sejarah ini maka dapat dipastikan bahwa pulau di sekitar Minahasa Utara termasuk pulau Lembe dikuasai kerajaan *Maadono*, sebagai bukti saat ini bahwa pulau Lembe pada awalnya diduduki oleh suku Loloda, di mana suku ini bekerja menanam kelapa, di sepanjang pantai Kora-kora, dengan komunitas penduduk yang masih sedikit jumlahnya waktu itu, namun sisanya masih ada yang berdomisili di desa Batu Likupang, Bahoi, Gangga, dan beberapa desa yang lainnya lagi seperti di Singkil. Pada masa sesudah gunung Karangetan dan Awu meletus komunitas Sangir mendominasi pulau-pulau di sekitarnya gunung itu termasuk pulau Lembe, Gangga, dan lain-lain. Tetapi pada awalnya pulau Lembe dihuni oleh komunitas Loloda.

Di pulau Lembe saat ini ada tiga desa yang dihuni oleh suku Loloda yaitu desa Lirang, desa Puloputus, desa Nusu (campuran Loloda-Sangir) juga ada di pantai Kora-Kora Tondano Gangga, Desa Batu kecamatan Likupang, dan beberapa desa lainnya, termasuk dua pulau yang berada di antara Halmahera dan Sulawesi Utara, terdapat suku Loloda Tafure dan Mayawu yang saat ini masuk kecamatan pulau Ternate.

Marginalisasi Loloda di Halmahera Fenomena Warisan Kolonial

Kajian mengenai ruang serta batas-batasnya telah banyak mendapat sorotan dari kalangan sejarawan asia tenggara yang memulai pembahasannya dari konsep 'state formation'. Apakah ruang-ruang terbentuk oleh mobilitas tinggi hubungan antara pulau yang mempertajam batas-batas wilayah

sebuah ruang, atau dibentuk oleh pandangan tentang darat dan tempat ketinggian sebagai ilham bagi kebudayaan agraris yang pada akhirnya menentukan pengendalian ruang dari wilayah pegunungan? Apakah konsep *state*—yang menyuratkan wacana tentang ruang politik, seperti dibayangkan ilmuwan barat, telah ada di wilayah Nusantara atau baru muncul setelah pengaruh kolonial semakin intensif?

Dalam diskusi tersebut ada dua kubu penting: pertama yang mengacu pada posisi penting sebuah wilayah dalam tatanan maritim. Yang kedua melihat pentingnya penguasaan sumber alam di darat dan pusat-pusat ritual agama-agama yang kemudian berpengaruh pada pola-pola hubungan masyarakat. Dalam konteks kajian ini, teori-teori tersebut memberi satu perspektif bahwa kehadiran sebuah ruang musti dipertimbangkan dalam kaitannya dengan ‘kepentingan’ yang berbeda-beda. Yang perlu diberi catatan, kajian sejarah musti juga mempertimbangkan perspektif yang ‘terjajah’ dan mendapat penjelasan terbaik dari sisi yang jarang difahami oleh kolonial sebagaimana ditunjukkan oleh Susanto Zuhdi dalam *Labu Wana Labu Rope*.

Dalam ranah sejarah, dengan unsur pokoknya yaitu “fakta”, pun tidak terlepas dari “interpretasi” yang memungkinkan setiap komunitas atau bangsa memiliki ranah subyektifnya. Sistem nilai menjadi kerangka suatu komunitas memberi interpretasi terhadap fakta sejarah yang tidak lain adalah kehidupan itu sendiri, bersumber dari kebudayaannya sebagaimana disampaikan Sahlins “*history is culturally ordered, according to meaningful schemes of things; (the) culture is historically reproduced in action*” (Sahlins, 1987: vii). Dilihat dari aspek sejarah dan budaya suatu struktur-struktur pemberi rasa kebersamaan dan ikatan solidaritas serta pemaknaan bagi kehidupan yang seharusnya harmonis, justru goyah dan sebagian bahkan hancur. Permasalahan yang muncul dari perspektif ini adalah terpilah-pilahnya keindonesiaan demi sebuah “indonesia-indonesia mini” tempat bernaung kehidupan yang sesungguhnya primordialistis. Dikaitkan dengan semangat dan nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928, gejala seperti ini patut ditelisik oleh karena menjadi menarik dikaji dalam konteks integrasi nasional.

Konsep ruang dan tempat di Indonesia timur berlapis-lapis, dan satu lapisan terbenam di lapisan yang lain dan pada saat tertentu muncul sebagai lapisan terluar. Selain dilapisi sejarah kolonial dan sejarah awal Indonesia modern, konsep ruang secara kultural masih menjadi lapis yang penting. Di Loloda siapa yang datang lebih dahulu mendiami suatu tempat boleh jadi menjadi bagian penting dalam penentuan wilayah, akan tetapi kehadiran orang luar yang datang kemudian pun patut diperhitungkan karena masing-masing berdasar pada narasi kultural yang berbeda. Narasi tempat yang dipengaruhi oleh silsilah keturunan (genealogi) mendapat tempat yang penting dalam penentuan wilayah, akan tetapi kehadiran “orang luar” pun penting dalam proses ini. Penjelasan mengenai ini terlihat dalam konteks Sikuru ketika harus berhadapan dengan aparat Ternate dan Belanda pada saat yang sama. Sikuru atas dasar loyalitas pada kebudayaannya didukung oleh salah satu aristokrat Ternate mampu membuat pemberontakan. Dan, pemberontakan seperti ini, terterima dalam pemaknaan budaya mereka. Mengapa, karena Ternate dalam konteks mythical narratives masih bersodara dengan Loloda.

Hegemoni masa lalu dalam sejarah politik pemerintahan di Maluku Utara nampak masih menampakkan diri. Di Kawasan laut dan kepulauan Maluku. Ternate masih menempatkan Loloda di bawah hegemoninya terbukti bahwa sebelum tahun 2015, setiap pelantikan pejabat adat Loloda, selalu dilakukan di istana/kraton Kesultanan Ternate, langsung di hadapan Paduka Sri Sultan Ternate dan seluruh aparat kerajaannya. Seolah relasi politik antara Kesultanan Ternate dan Pemerintah Kolonial Belanda masih tetap bertahan paling tidak hingga masa akhir kehidupan Sultan Ternate ke-48, Drs. H.M. Mudaffar Sjah, Bc.Hk., M.Si. Loloda masih selalu diposisikan sebagai kerajaan yang setengah merdeka (vazal) di bawah Ternate. Loloda selalu ditempatkan sebagai wilayah pinggir (periferi) dari kerajaan pusat yakni Ternate. Loloda selalu ditempatkan sebagai entitas politik yang inferior, sedangkan Ternate selalu menempatkan dirinya di atas Loloda, di mana Ternate selalu menjadi superior. Relasi politik kolonial yang masih tetap bertahan sampai awal tahun 2015 yang lalu situasinya masih nampak ketika periode

pemerintahan Hindia Belanda di Maluku Utara pada 1817-1945, yang ironisnya berlanjut hingga masa kahir Sultan Mudaffar sjah.

Wacana lama tentang revitalisasi dan representasi identitas sejarah dan budaya Loloda yang pernah Berjaya di zamannya namun terabaikan, sudah sering didengungkan sejak bergulirnya UU Otda. Undang-undang ini meliputi penggabungan dan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia pada 1999, pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Orde baru digantikan oleh rezim Orde Reformasi, yang oleh banyak kalangan dianggap masih bermasalah dalam idealism. Orde itu dianggap masih “setengah hati” bahkan “salah kaprah dan kebablasan”, karena euphoria demokrasi yang semakin tidak terkendali. Euforia itu justru menimbulkan masalah baru yang tidak kunjung membuat Indonesia menjadi lebih baik, bahkan semakin parah. Rezim Reformasi belum menyelesaikan tugasnya secara benar. Reformasi belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan Otda yang memproduksi pemekaran dan penggabungan wilayah. Ratusan wilayah terus berjuang merubah status menjadi DOB mulai dari tingkat dusun hingga tingkat propinsi.

Baik Pemekaran wilayah maupun penggabungan wilayah sebagai produk turunan dari UU Otda No. 22 Thn. 1999 hingga No. 32 Thn. 2004 nampaknya tidak bisa diikuti secara aman, lancar, dan terkendali oleh semua daerah di Indonesia, Contoh kasus adalah pada Kecamatan Loloda di Propinsi Maluku Utara. Kecamatan Loloda yang dahulunya hanya satu di Kabupaten Halmahera Utara, dipecah menjadi dua bagian yaitu Kecamatan Loloda Utara di Kabupaten Halmahera Utara (ibukota Tobelo) dan kecamatan Loloda Selatan di Kabupaten Halmahera Barat (ibukota Jailolo), sementara itu dua kabupaten ini juga sedang terlibat masalah yang serius yakni “sengketa perbatasan 6 desa”. Seluruh wilayah kecamatan Loloda yang luas itu yang meliputi seluruh wilayah Halmahera Utara dan Barat, akhirnya dibagi dua wilayah kecamatan berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2003.

Loloda berada dalam situasi yang dilematis, dalam mewujudkan cita-citanya sebagai salah satu kabupaten baru di Propinsi Maluku Utara. Situasi walaupun Hindia Belanda telah lama

runtuh paling tidak dalam tahun 1942- 1949. mewujudkan dirinya sebagai jejak sejarah warisan politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

PENUTUP

Berbicara mengenai Propinsi Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, karena Loloda tidak bisa dilepaskan dari propinsi Maluku Utara ini sebagai bagian integral dari dunia Maluku, baik dalam konteks mitologi, genealogi, geografis, sosiologis, ekonomis, politis, kultural, maupun historis,

Loloda merupakan sebuah bekas kerajaan tertua Maluku (*Moloku Loloda*) yang terletak di pesisir pantai barat laut Halmahera bagian utara di Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” seperti perkataan Andaya (2015). Belum ada sumber yang menjelaskan secara pasti kapan persisnya kerajaan ini berdiri. Namun, sejumlah sumber terbatas telah ditemukan baik lisan maupun tulisan, baik dari penduduk Loloda di Halmahera Utara dan Barat maupun dari penulis-penulis asing yang pernah berada di Maluku Utara, terutama Portugis (1512-1575) dan Belanda (1596-1942). Sumber-sumber itu memberi petunjuk yang menyebutkan bahwa kerajaan ini sudah terbentuk dalam paruh pertama abad ke-13 atau 1220 Masehi jauh sebelum kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo terbentuk.

Secara geografis Loloda berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar dan terpanjang di seluruh kawasan ini. Dalam konteks “keindonesiaan”, kini Loloda adalah salah satu daerah kecamatan di Propinsi Maluku Utara. Kecamatan Loloda berada pada dua kabupaten yang berbeda yakni Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Posisi Loloda dikatakan oleh sumber-sumber itu sebagai kerajaan yang derajatnya tidak lebih rendah dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang dikenal sebagai MKR (*Moloku Kie Raha*=Empat Kerajaan Gunung Maluku). Loloda dalam konteks topografi wilayah terdiri dari struktur alamiah yang beragam yakni kepulauan, daerah aliran sungai (DAS), pesisir, teluk, tanjung, dan dataran tinggi seperti perbukitan dan pegunungan.

Ibu kota pusat pemerintahan Loloda sebelum tahun 1930-an berada di pinggir sebuah sungai bernama Sungai Soasio (sungai sembilan kelok atau Sembilan kampung), yang bermuara ke Laut Maluku melalui perairan Teluk Loloda.

Loloda dalam pengertian ini dianggap setara dengan MKR. Dari keempat kerajaan MKR itu hanya Ternate dan Tidore yang sangat hegemonik di kawasan ini selama masa kolonial dan merupakan dua kerajaan Maluku yang selalu bersaing sengit dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas wilayah dan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku Utara terutama dalam periode-periode sebelum runtuhnya VOC hingga periode awal abad ke-19. Di masa kini keempat kerajaan MKR itu nampak masih mempertahankan dan melestarikan kebesaran masa lalunya menurut sejarah dan budaya yang mereka pahami masing-masing. Pelestarian itu nampak dalam berbagai atribut simbolik, serta upacara-upacara ritual adat dan tradisi tahunan kerajaan bersangkutan.

Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi kerajaan di atas masih terus belangsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950-1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapus oleh Pemerintah Indonesia. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu adalah merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia.

Hingga saat ini hanya empat bekas kerajaan (kesultanan) utama di Maluku yang secara keseluruhan masih diakui sebagai kerajaan berbentuk kesultanan yaitu, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Keempatnya masih dilestarikan oleh pemerintah daerah maupun pusat sebagai bekas kerajaan berbentuk kesultanan yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan sultan-sultan mereka secara adat menurut tradisi kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Sekarang ini, dari keempat kesultanan itu, hanya Jailolo yang tidak memiliki istana lagi, meskipun masih memiliki Lembaga adat daerah dan Sultan.

Berbeda dengan Jailolo, Loloda sejak 1909 hingga meninggalnya Sultan Ternate H.M. Mudaffar Sjah, Bc.Hk., M.Si. (Sultan Ternate ke-48) tidak pernah lagi diakui dan disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan atau kesultanan di Maluku. Nama dan kata “Loloda” dalam sejarah lokal Maluku Utara sulit ditemukan dan dalam Sejarah Nasional Indonesia Loloda tidak pernah ada. Namun demikian, seluruh generasi keturunan raja-raja dan bangsawan Loloda dari masa lalu dan yang masih ada sekarang, dengan didukung oleh segenap masyarakatnya di perantauan di dalam maupun di luar Maluku Utara, masih terus berusaha menjaga dan memelihara nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masa lalunya, baik dalam perilaku hidup sehari-hari maupun dalam ingatan dan memory kolektif mereka.

Sejak pembubaran kerajaan Loloda oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda karena pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya di bawah pimpinan Kapitan Sikuru, pada 9 Februari 1909, Loloda terlupakan dalam sejarah Maluku Utara dan hilang dalam sejarah Nusantara. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Loloda pun kemudian terabaikan dalam Sejarah Nasional Indonesia. Ternate dan Belanda menganggap Loloda tidak ubahnya hanya sebagai kerajaan kecil yang tidak memiliki kedaulatan dan kekuasaan signifikan di kepulauan rempah-rempah Maluku. Padahal tanpa menguasai Loloda di daratan Halmahera dan kepulauannya, Ternate juga tidak akan memiliki kekuatan dan hegemoni apa pun di Maluku, baik dalam aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu bisa dipastikan Belanda pun akan sulit untuk berkuasa lebih lama di Maluku Utara tanpa menguasai dua potensi Loloda tersebut. Pemberontakan Sikuru menewaskan van Rooij (asisten administrasi pemerintahan Residen Belanda di Ternate bidang ekonomi dan perpajakan dan dua orang polisi militer pengawalnya). Akibat peristiwa itu Pemerintah Kolonial Hinda Belanda membubarkan Kerajaan Loloda dan menghapuskan statusnya sebagai kerajaan semi merdeka di bawah Ternate. Setelah dibubarkan seluruh wilayah kerajaan ini dimasukkan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate yang dikuasai oleh Belanda melalui pemerintahan Keresidenan

Ternate dan daerah-daerah taklukannya (*de Residentie van Ternate en Onderhorigheden*). Status Loloda yang sebelumnya kerajaan tersendiri berubah menjadi daerah setingkat distrik (kecamatan) hingga sekarang ini.

Loloda di masa lalu, sebelum kehadiran bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan meliputi hampir seluruh wilayah Halmahera dan Morotai (sebuah pulau yang berbatasan dengan samudera Pasifik di sebelah timur laut Halmahera bagian Utara). Tetapi sejak masuknya Perhimpunan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC (*Vereenigde oost Indische Compagnie, 1602-1799*) sampai pada masa runtuhnya Pemerintahan Kolonial Hindia Timur Belanda (1942) di Maluku Utara, wilayah Loloda mulai mengalami penyempitan karena melepaskan diri satu persatu dan masuk menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo secara politik. Pada masa Pra-Kolonial, Loloda Utara di Halmahera Utara dan Loloda Selatan di Halmahera Barat dengan gugusan pulau-pulau di sekitarnya, yaitu Loloda Utara Kepulauan (Halmahera Utara) dan Loloda Selatan Kepulauan (Halmahera Barat) dahulunya berada dalam satu ruang lingkup wilayah administrasi kerajaan Loloda.

Halmahera Utara dan Halmahera Barat dahulunya masih tergabung ke dalam satu kabupaten saja yaitu Kabupaten Halmahera Utara yang beribukota di Tobelo. Namun, sejak terbitnya UU No. 1 Tahun 2003, sebagai bagian dari UU Otonomi Daerah (UU Otda No. 22 tahun 1999) dengan program-program pemekaran wilayahnya, Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan menjadi dua wilayah kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat yang beribukota di Jailolo. Halmahera Utara (selanjutnya disingkat Halut) dan Halmahera Barat (selanjutnya disingkat Halbar). Sejak saat ini wilayah Loloda yang tadinya luas kini sudah terpecah menjadi dua wilayah kabupaten yakni kabupaten Halut dan Halbar. Kondisi ini menyulitkan Loloda untuk membentuk dirinya menjadi kabupaten tersendiri menurut kedua UU Otda tersebut di atas, disebabkan adanya kemungkinan konflik

perbatasan di antara dua kabupaten (Halut dan Halbar). Saat ini seluruh Kecamatan Loloda pada dua Kabupaten yaitu Halut dan Halbar memiliki total 51 buah desa, yang terdiri dari 28 desa di Loloda Utara Halmahera Utara dan 22 desa Loloda Selatan Halmahera Barat, dan ada satu desa lagi bernama Loloda Ternate di Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Paramita R. 2008. *Bunga Angin Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press-Asosiasi Persahabatan dan Kerja sama Indonesia-Portugal dan Yayasan Obor Indonesia.
- Amal, M. Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah: Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1250-1950*. Makassar: Bakti.
- Andaya, Leonard. 1993. *The world of Maluku*. Honolulu: University of Hawaii.
- Coolhaas, W. Ph. 1923. "Kroniek van het Rijk Batjan", *Overgedrukt uit Het Tijdschrift van Het Koning Batjan*. Genootschap van Kunsten en Wetenschap, deel LXIII, afl.2.
- Crab, P. Van der. 1862. *De Moluksche Eilanden: Reis van Z.E den Gouverneur-Generaal Charles Ferdinand Pehud door den Molukschen Archipel*. Batavia: Lange en Co.
- De Clercq, F.S.A. 1890. *De Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. Leiden: Brill.
- Fraassen, Ch. F. Van. 1985. *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: van Soa Organisatie en Vier Deling-Een Studie van Traditionale Samenleving en en culture in Indonesie*, 1 Vol. Leiden: Leiden Universiteit.
- 1987. *Ternate, de Molukken en de Indonesische Archipel: van Soa Organisatie en Vier Deling-Een Studie van Traditionale Samenleving en en culture in Indonesie*, 2 Vols. Leiden: Leiden Universiteit.
- Hasan, Abdul Hamid. 2001. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Jacobs, Hubert Th.Th. M. 1971. "A Treatise on The Moluccas (c.1544): Probably Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost", *Historia Das Moluccas*, Edited, Annotated, and Translated in to English from The Portuguese Manuscript in The Archivo General de Indies, Seville. Rome, Italy: Jesuit Historical Institute via dei Penitenzieri 20 00193, St. Louis University, St Louis, Mo. 63103, USA.

- Leirissa, R.Z. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lewis, Bernard. 2009. *Sejarah: Diingat, Ditemukan Kembali, Ditemu-Ciptakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Mapanawang, Arend. L. 2012. *Loloda Kerajaan Pertama Moluccas (Sejarah Kerajaan Loloda Maluku)*. Tobelo: Yayasan Medika Mandiri Halmahera.
- Masinambow, E.K.M. (ed.). 1980. *Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas-LIPI).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 1-76 & Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 1-178.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara, hlm. 1-22.
- Valentijns, Francois. 1856. *Oud en Nieuw oost-Indien. Met Aanteekeningen, Volledige Inhoudsregisters, Chronologische Lijsten, Enz. Uitgegeven Door D.S. Keijzer. Eerste Deel. 'sGravenhage: H.C. Susan-C. Hzon.*
- Visser, Leontine E (ed.). 1980. *Halmahera and Beyond: Social Science Research in The Moluccas*. Leiden: KITLV Press.
- Zuhdi, Susanto. 2010. *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang Terabaikan*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

STT
NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986

ISSN 977-0125-9989-1-9



9 770125 998919

LIPI Press